

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bahan penting yang dapat dipertimbangkan dalam penyusunan laporan serta menjadi referensi dalam melaksanakan penelitian. Dengan menganalisis penelitian terdahulu, peneliti mendapatkan tambahan wawasan dan pengetahuan yang beragam berdasarkan teori yang sudah digunakan dalam penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu yang dipilih menjadi referensi dalam penyusunan laporan ini disesuaikan dengan pokok pembahasan yang berkaitan dengan topik penelitian, sehingga fokus penelitian dapat terarah serta tidak meluas. Berikut adalah penelitian terdahulu yang dipilih menjadi referensi dalam melaksanakan penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Hamdani, H., & Rosmawati, N. (2022). Pembangunan Ekonomi Dalam Pembangunan Sosial di Indonesia: Analisis atas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Kubang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon. *WELFARE: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*. Volume 11 Nomor 2, November 2022.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan alasan logis melalui analisis Program BPNT dalam peningkatan pembangunan ekonomi negara. Penelitian ini berlokasi di Desa Kubang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon. Penggunaan metode dalam penelitian adalah kualitatif melalui pendekatan deskriptif dengan tujuan agar data yang disajikan dapat dijelaskan secara dalam. Pengumpulan data dari sumber data yang dipilih menggunakan tiga teknik antara lain observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dalam penelitian ini bersumber dari sampel penelitian yaitu pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program, antara lain petugas e-warong, keluarga

penerima manfaat, dan penanggung jawab program. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan teori kesejahteraan masyarakat oleh Michael Todaro & Smith. Teori ini menjelaskan berbagai aspek kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dengan menasar pada tingkat kebutuhan dasar, taraf hidup, perluasan ukuran ekonomi, dan ketersediaan pilihan sosial bagi individu dan bangsa. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan program BPNT sesuai dengan pedoman akan tetapi terdapat pada hambatan keteraturan pencairan dana sehingga waktu penyaluran bantuan tidak konsisten. Program BPNT yang ditujukan untuk menjamin kelangsungan hidup melalui penyediaan pangan baik dalam meningkatkan kesejahteraan. Penerapan bantuan non tunai kepada masyarakat memiliki dampak peningkatan ekonomi yang berkelanjutan terhadap negara.

2. Imelda, M. dan Sufiawan, Nur A. (2022). Analisis Dampak Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Pemenuhan Kebutuhan Pangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Di Kota Payakumbuh Pada Masa Covid-19. *PARETO: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*. Volume 5 Nomor 1, Juni 2022.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak bantuan pangan non tunai dalam pemenuhan kebutuhan pangan keluarga penerima manfaat. Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat adalah latar tempat penelitian dilaksanakan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan tes non-parametrik. Adapun teknik pengambilan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, pengumpulan kuesioner, dan penelitian dokumen. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 98 kepala keluarga penerima manfaat. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah probability sampling dengan jenis simple random

sampling. Hasil dari penelitian ini adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang disalurkan terhadap para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama keadaan Covid-19 memberikan dampak baik positif dalam pemenuhan kebutuhan dasar pangan keluarga. Saat masa Covid-19, kondisi pengeluaran keluarga di wilayah Kota Payakumbuh mengalami kenaikan sehingga dibutuhkan upaya untuk menekan pengeluaran tersebut.

3. Anwar, Charil, dkk. (2023). Pengaruh Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Gorontalo. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*. Volume 3 Nomor 3, Juli 2023.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh program bantuan pangan non tunai terhadap tingkat kemiskinan. Latar tempat penelitian bertempat di Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis data dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data tersebut diperoleh dari instansi pengumpul data. Oleh karena itu, penelitian ini membutuhkan informasi dari Kantor Dinas Sosial & BPS (Badan Pusat Statistik) tentang bantuan pangan non tunai dan tingkat Kemiskinan di Kota Gorontalo. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa program bantuan pangan non tunai berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini berarti, apabila nilai bantuan yang diberikan dari program bantuan pangan non tunai ditambahkan, maka kemiskinan menjadi tinggi namun tidak berpengaruh pada tingkat kemiskinan secara signifikan.

4. Aliruddin, Tarigan, A. A., dan Irham, M. (2023). Dampak Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Terhadap Ekonomi Keluarga Miskin (Studi Kasus: Di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal. *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)*. Volume 3 Nomor 1, Januari 2023.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap perekonomian masyarakat miskin. Adapun lokasi yang digunakan sebagai latar tempat penelitian bertempat di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang didapat dari pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun data primer dalam penelitian bersumber dari Pemerintah Kelurahan Longat, pemilik E-warong, dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal. Hasil dari penelitian ini adalah diketahuinya dampak implementasi program bantuan pangan non tunai (BPNT) terhadap ekonomi keluarga miskin di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal yang cukup maksimal. Program BPNT yang dilaksanakan di Kelurahan Longat cukup berdampak baik terhadap perekonomian masyarakat khususnya bagi keluarga miskin yang merupakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hal ini dapat dilihat dari berkurangnya beban pengeluaran (konsumsi) mereka dalam pemenuhan kebutuhan dasar pangan karena sudah terpenuhi dari bantuan yang diperoleh dari program BPNT yang telah dilaksanakan

5. Hasimi, D. Mukminatul. (2020). Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam*. Volume 2 Nomor 1, Januari 2020.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan merupakan latar penelitian ini dilaksanakan. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data primer dalam penelitian diperoleh dari hasil wawancara dan kuesioner sedangkan data sekunder diperoleh dari data dokumentasi. Tujuan penggunaan kuesioner adalah untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan dasar yang validitas tinggi dan mendalam. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Merak dengan total penerima 864 dengan jumlah sampel sebesar 90 penerima (penentuan sampel menggunakan rumus Slovin). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa program BPNT di Desa Merak Batin belum cukup dilaksanakan berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T yaitu tepat sasaran, tepat kuantitas, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat manajemen. Program BPNT di Desa Merak Batin hanya dapat memenuhi tiga indikator yaitu tepat kuantitas, tepat harga, dan tepat kualitas. Program BPNT di Desa Melak Batin gagal meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu karena tiga indikator kesejahteraan masyarakat yaitu kebutuhan dasar, taraf hidup, dan perluasan ekonomi tidak tercapai. Hal ini dikarenakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Melak Batin hanya berfungsi sebagai upaya penghematan biaya bagi rumah tangga miskin.

6. Muliana, L., Mursyidin, M., & Siregar, M. (2021). Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Kesejahteraan Keluarga di Desa Padang Seurahet Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Public Policy*. Volume 7 Nomor 2, Oktober 2021.

Penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kesejahteraan keluarga dan melihat apakah terjadi penurunan kemiskinan setelah program ini dilaksanakan. Adapun penelitian ini berlokasi di Desa Padang Seurahet Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi terkait realitas yang dikaji pada konteks sosial. Observasi berfokus pada aktivitas keluarga penerima manfaat PKH, wawancara langsung dengan keluarga penerima PKH dilakukan agar mendapat informasi yang valid dan akurat serta penelitian dokumen pustaka untuk melengkapi data. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) berdampak pada penurunan angka kemiskinan. Kemudian PKH berdampak pada kesejahteraan keluarga penerima manfaat khususnya di Desa Padang Seurahet yang mengalami perubahan dalam keluarganya berupa pengurangan biaya konsumsi, pemenuhan kebutuhan keluarga, serta pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga lain dengan dana tunai yang diterima.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan, terdapat beberapa perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang dilakukan baik dari metode, pendekatan, hingga pada lokasi penelitian. Berikut adalah uraian penjelasan tentang persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dan yang dilakukan.

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Hamdan Hamdani & Ninda Rosmawati (2022)	Pembangunan Ekonomi Dalam Pembangunan Sosial di Indonesia: Analisis atas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Kubang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon	Kualitatif melalui pendekatan deskriptif	Metode penelitian yaitu kualitatif Pendekatan penelitian yaitu deskriptif	Subjek penelitian yaitu unsur pelaksana Program Bantuan pangan Non Tunai (BPNT) Aspek yang digunakan merupakan penjabaran dari teori kesejahteraan masyarakat menurut Todaro & Smith Lokasi penelitian di Desa Kubang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon
2.	Muthia Imelda Nur & Ari Sufiawan (2022)	Analisis Dampak Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Pemenuhan Kebutuhan Pangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Di Kota Payakumbuh Pada Masa Covid-19	Kuantitatif dengan pendekatan komparatif	Subjek penelitian yaitu Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai Objek penelitian yang serupa yaitu pemenuhan kebutuhan pangan	Metode penelitian yaitu kuantitatif Pendekatan penelitian yaitu komparatif Lokasi penelitian di Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Chairil Anwar, Melizubaida Mahmud, Abdulrahim Maruwae, Radia Hafi , & Sudirman (2023)	Pengaruh Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Gorontalo	Kuantitatif dengan pendekatan Deskriptif	Pendekatan penelitian yaitu deskriptif	Metode penelitian yaitu kuantitatif Subjek penelitian yaitu Kantor Dinas Sosial & BPS Kota Gorontalo Lokasi penelitian di Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo
4.	Aliruddin, Azhari Akmal Tarigan, & Mawaddah Irham (2023)	Dampak Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Terhadap Ekonomi Keluarga Miskin (Studi Kasus : Di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal)	Kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Metode penelitian yaitu kualitatif Pendekatan penelitian yaitu deskriptif Subjek penelitian yaitu Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai	Aspek yang digunakan adalah indikator keberhasilan program Lokasi penelitian di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal)
5.	Diah Mukminatul Hasimi (2020)	Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Metode penelitian yaitu kualitatif Pendekatan penelitian	Analisis data penelitian lebih mengedepankan penggunaan perspektif ekonomi islam

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Dalam Perspektif Ekonomi Islam		yaitu deskriptif Subjek penelitian yaitu Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai	Aspek yang digunakan adalah indikator keberhasilan program berdasarkan prinsip ekonomi islam Lokasi penelitian di Di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.
6.	Lia Muliana, Mursyidin, & Muharriyanti Siregar (2021)	Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Kesejahteraan Keluarga di Desa Padang Seurahet Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat	Kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Metode penelitian yaitu kualitatif Pendekatan penelitian yaitu deskriptif	Subjek penelitian yaitu Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Lokasi penelitian di Desa Padang Seurahet Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat

2.2 Teori yang Relevan dengan Penelitian

Penyusunan penelitian ini tidak lepas dari penggunaan beragam teori. Teori yang dipilih merupakan kajian yang relevan dengan topik penelitian. Berikut adalah beragam teori relevan yang digunakan dalam penelitian ini.

2.2.1 Tinjauan tentang Kebutuhan Dasar

1. Definisi

Kebutuhan dasar adalah segala hal yang dibutuhkan manusia untuk menjaga dan mempertahankan keberlangsungan fisiologis dan psikologis (Santoso, 2014). Kebutuhan merupakan kondisi kesenjangan yang dialami antara suatu kenyataan dengan dorongan yang ada dalam diri (Mangkunegara, 2002). Kebutuhan dasar dapat didefinisikan sebagai segala unsur yang dibutuhkan manusia untuk menjaga dan mempertahankan kondisi baik fisiologis maupun psikologis yang bertujuan agar dapat dan melanjutkan kehidupan.

2. Ciri-ciri

Kebutuhan dasar sebagai suatu aspek yang harus dipenuhi manusia memiliki ciri-ciri sebagai berikut (Anggreni & Wardini, 2017):

- a. Tiap manusia pada dasarnya memiliki kebutuhan dasar yang sama, tetapi dapat berubah dengan adanya budaya setempat.
- b. Dalam keadaan terdesak, manusia diperbolehkan memprioritaskan kebutuhan yang sangat dibutuhkan. Apabila dalam kondisi berbahaya, manusia dapat menyelamatkan diri terlebih dahulu, selanjutnya dapat melakukan pemenuhan kebutuhan dasar fisiologisnya.

- c. Seluruh kebutuhan dasar perlu dilakukan pemenuhan, tetapi ada yang bisa ditunda, diubah prioritasnya, serta dipenuhi di kemudian nanti.
- d. Adanya kegagalan dalam proses pemenuhan kebutuhan dasar akan berpengaruh pada tubuh dan jiwa manusia.
- e. Kebutuhan mendorong manusia agar mampu berpikir, berusaha, serta bergerak untuk melakukan pemenuhan terhadapnya.
- f. Seseorang akan berpikir, berusaha, dan bergerak untuk melakukan pemenuhan kebutuhannya melalui serangkaian upaya.
- g. Seluruh kebutuhan dasar mempunyai pengaruh antara satu dengan lainnya.

3. Klasifikasi kebutuhan dasar

Terdapat lima klasifikasi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi manusia untuk mendapatkan kehidupan yang makmur dan sejahtera dimulai dari fisiologis, rasa aman, sosial, harga diri, hingga aktualisasi diri (Maslow, 2018). Kebutuhan yang paling awal harus dilakukan apabila ingin melakukan pemenuhan kebutuhan selanjutnya. Berikut adalah penjelasan mengenai kelima kebutuhan dasar:

a. *Physiological needs* (kebutuhan fisiologis)

Kebutuhan ini dikenal dengan istilah *faali* yang merupakan tingkatan paling utama dari kebutuhan manusia. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan yang berhubungan dengan kondisi tubuh untuk keberlangsungan hidup seperti pangan (makanan), sandang (pakaian), dan papan (tempat tinggal). Kebutuhan ini menjadi yang paling dasar karena merupakan aspek terpenting yang harus dipenuhi dalam kehidupan manusia seperti oksigen, makanan, minuman, tempat tinggal, tidur, seks, dan lain-lain.

b. *Safety needs* (kebutuhan rasa aman)

Kebutuhan ini menekankan pada tindakan untuk mendapatkan rasa aman pada hidup manusia. Kebutuhan rasa aman adalah kebutuhan untuk mendapatkan rasa aman dari hal-hal yang buruk. Adapun hal-hal buruk yang dimaksud adalah kondisi rasa takut dan khawatir terhadap masalah-masalah yang dihadapi jangka panjang baik dari dalam maupun lingkungan sekitar.

c. *Social needs* (kebutuhan sosial)

Apabila kebutuhan fisiologis dan keselamatan terpenuhi, maka akan muncul kebutuhan kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial adalah kebutuhan untuk menjalin relasi pada orang lain atau masyarakat agar dapat diterima dan diakui. Kebutuhan ini menekankan pada pemahaman manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki perasaan untuk peduli dan dipedulikan sehingga tercipta kepercayaan dan perdamaian dalam kehidupan.

d. *Esteem needs* (kebutuhan harga diri)

Kebutuhan harga diri adalah kebutuhan untuk menunjukkan derajat diri sehingga mendapatkan penilaian serta penghargaan yang baik dari orang lain atau masyarakat. Kebutuhan ini menekankan pada pencapaian untuk menunjukkan derajatnya sehingga dapat dihargai, dipuji, dan dihormati. Kebutuhan harga diri adalah kebutuhan untuk mendapatkan rasa dihargai oleh orang lain atau masyarakat berupa julukan, pujian, apresiasi, ketenaran, dan kepercayaan sehingga mampu memiliki sebuah penilaian yang baik akan harga dirinya di lingkungan masyarakat.

e. *Self actualization* (kebutuhan aktualisasi diri)

Aktualisasi diri merupakan kebutuhan dasar terakhir manusia. Pada tingkatan ini, seseorang akan berusaha dengan semua kemampuannya untuk mendapatkan dan mencapai kemauan yang diinginkan serta bisa dilakukan. Semua hal tersebut merupakan cerminan atas harapan dan keinginan hidup dengan segala potensi dan kemampuan yang dimiliki. Aktualisasi diri dapat dilakukan jika seluruh kebutuhan dasar sebelumnya sudah dilakukan.

4. Tiga bentuk kebutuhan dasar

Ada tiga bentuk kebutuhan dasar bagi manusia yaitu kebutuhan akan prestasi, kekuasaan, dan afiliasi (Mc Clelland dalam Susanto, 2018). Berikut penjelasan mengenai ketiga bentuk kebutuhan dasar tersebut:

a. Kebutuhan akan prestasi (*need of achievement*)

Kebutuhan akan prestasi atau dikenal dengan istilah *n-Ach* mendorong seseorang untuk berprestasi apabila ada target nyata yang bisa dicapai nyata dan memiliki peluang untuk diperoleh. Menurut McClelland, setiap individu memiliki kebutuhan tersendiri sesuai dengan minat, karakter, dan *mindset* yang membentuknya. Setiap individu memiliki dorongan yang kuat untuk berhasil dalam mencapai tujuan serta kepuasan pribadinya.

b. Kebutuhan akan kekuasaan (*need of power*)

Kebutuhan akan kekuasaan *n-Pow* merupakan suatu keinginan atau hasrat untuk memiliki pengaruh, menjadi yang berpengaruh, dan mengendalikan pengaruh di luar dirinya. McClelland merinci bahwa seseorang yang memiliki *n-Pow* tinggi, akan cenderung memiliki karakter bertanggung

jawab, berjuang untuk memengaruhi orang lain, serta senang ditempatkan dalam situasi kompetitif yang bersifat pada mobilitas status sosial.

c. Kebutuhan akan afiliasi (*need of affiliation*)

Kebutuhan ketiga yaitu *n-Aff* adalah kebutuhan untuk memperoleh hubungan sosial yang baik. Kebutuhan ini ditandai dengan kecenderungan seseorang untuk memiliki tali persahabatan, situasi sosial yang rukun, dan menginginkan hubungan dengan melibatkan tingkat mutualitas yang tinggi.

5. Faktor yang mempengaruhi pemenuhan kebutuhan dasar

Masing-masing individu dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara berbeda antara satu dengan yang lain (Maslow dalam Santoso, 2014). Hal ini dapat terjadi disebabkan karena adanya faktor-faktor berikut:

- a. Status individu dan kedudukannya dalam keluarga dan masyarakat;
- b. Latar belakang pendidikan yang ditempuh;
- c. Latar belakang pengalaman hidup;
- d. Cita-cita dan harapan hidup;
- e. Pandangan hidup.

2.2.2 Tinjauan tentang Keluarga

1. Pengertian keluarga

Keluarga adalah lingkungan pertama di mana individu tumbuh, berkembang, dan belajar terhadap nilai-nilai yang ada di sekitarnya. Proses tumbuh, berkembang, dan belajar tersebut berjalan secara terus menerus selama individu masih hidup. Keluarga merupakan wadah yang sangat penting bagi setiap individu dan merupakan kelompok sosial pertama di mana individu yang masih

berupa anak menjadi anggotanya (Ahmadi, 2016). Keluarga terdiri dari dua atau lebih individu yang berkumpul karena hubungan darah, perkawinan, atau proses adopsi hidup dalam suatu rumah tangga serta saling berinteraksi satu sama lain dan menciptakan serta mempertahankan kebudayaan (Friedman, 2013).

2. Fungsi Keluarga

Keluarga memiliki banyak fungsi dalam proses pembentukan kepribadian dan karakter bagi individu-individu di dalamnya. Terdapat delapan jenis fungsi keluarga yang penting antara lain sebagai berikut (Malihah & Kolip, 2011):

a. Fungsi Keagamaan

Keluarga berperan dalam menumbuhkan serta mengembangkan nilai-nilai penting dalam beragama sehingga menjadikan individu sebagai pelaksana nilai beragama yang memiliki kepribadian baik dan taat terhadap peraturan.

b. Fungsi Sosial Budaya

Keberadaan keluarga memberikan kesempatan kepada seluruh anggotanya dalam mengembangkan kebudayaan dan nilai sosial yang dianut.

c. Fungsi Cinta dan Kasih Sayang

Keluarga memberikan pertalian hubungan yang erat dari interaksi suami dengan istri, orang tua dengan anak-anaknya, anak dengan anak, serta sehingga terciptanya rasa saling mengasihi dan menyayangi satu sama lain.

d. Fungsi Perlindungan

Keluarga menjadi tempat berlindung serta mewujudkan rasa aman, tenteram, dan memberi kehangatan bagi setiap individu di dalamnya.

e. Fungsi Reproduksi

Setiap keluarga berhak atas perencanaan untuk melanjutkan keturunannya karena hal tersebut merupakan fitrah manusia yang universal.

f. Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan

Keluarga berfungsi untuk membentuk setiap kepribadian individu yang ada di dalamnya melalui proses penanaman nilai-nilai sosial dan pembelajaran.

g. Fungsi Ekonomi

Dalam mempertahankan kehidupan, diperlukan peran individu dalam keluarga untuk memenuhi kebutuhannya sebagai bentuk ketahanan.

2.2.3 Tinjauan tentang Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

1. Definisi program

Bantuan pangan nontunai adalah bantuan bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk uang elektronik (saldo bank) dari pemerintah kepada KPM setiap bulannya dan yang digunakan KPM hanya untuk membeli bahan pangan di e-Warong (Tim Koordinator BPNT, 2019). Tujuan dibuatnya bantuan sosial pangan ini secara nontunai adalah untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta untuk mendorong keuangan agar dapat bersifat inklusif (terbuka).

2. Tujuan program

Tujuan program bantuan pangan non tunai adalah untuk meningkatkan ketepatan kelompok sasaran, memberikan gizi yang lebih seimbang serta memberikan lebih banyak alternatif pemenuhan untuk keluarga miskin Adapun rincian tujuan dari Program BPNT terdiri dari empat poin antara lain sebagai berikut:

- a. Mengurangi beban pengeluaran keuangan KPM dengan pemberian makanan untuk pemenuhan kebutuhan makanan keluarga.
- b. Meningkatkan pemenuhan gizi yang lebih seimbang terhadap KPM
- c. Meningkatkan kinerja program dengan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, dan administrasi yang lebih baik
- d. Memberikan pilihan dan kendali terhadap KPM dalam pemenuhan kebutuhan pangan atau makanan keluarga.

3. Manfaat program

Berikut ini adalah berbagai manfaat pelaksanaan program bantuan pangan nontunai terhadap keluarga penerima manfaat antara lain:

- a. Meningkatnya keberdayaan pangan keluarga pada KPM serta wujud pemberian perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan.
- b. Meningkatnya efisiensi dalam pemberian bantuan sosial.
- c. Meningkatnya akses keluarga terhadap layanan perbankan dan keuangan.
- d. Meningkatnya transaksi *cashless* untuk mendukung program keuangan pemerintah Gerakan Nasional Nontunai.
- e. Meningkatnya perekonomian daerah khususnya usaha mikro kecil dan menengah di bidang perdagangan makanan.

4. Prinsip pelaksanaan

Untuk mewujudkan pondasi pelaksanaan Program BPNT yang kuat, maka dalam pemanfaatannya harus memenuhi prinsip:

- a. Memberikan preferensi terhadap KPM dalam memilih jumlah, jenis waktu, kualitas, serta lokasi pembelian pangan di manapun dan kapanpun.
- b. KPM bebas memilih e-Warong tertentu dan e-Warong tidak diperkenankan memaketkan bahan pangan yang membuat KPM memiliki preferensi dalam menentukan bahan pangan yang dibeli.
- c. E-Warong bebas membeli pasokan bahan pangan dengan memperhatikan ketepatan harga, kualitas, jumlah, waktu, sasaran dan administrasi.
- d. Bank Penyalur bertugas menyalurkan dana bantuan ke rekening KPM dan tidak bertugas menyalurkan bahan pangan kepada KPM, termasuk tidak melakukan pemesanan bahan pangan.
- e. Mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah rakyat untuk memperoleh pembelian dengan bertransaksi dan melayani KPM.
- f. Memberikan akses keuangan terhadap usaha mikro dan KPM.
- g. Pemerintah pusat dan daerah melaksanakan monitoring pelaksanaan BPNT sesuai dengan pedoman umum dan teknis yang berlaku.

2.2.4 Tinjauan tentang Kemiskinan

1. Definisi kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi yang ditandai dengan serba kekurangan dan menjadi masalah yang dihadapi masyarakat serta menjadi perhatian banyak orang di dunia ini disebabkan karena dampaknya yang luas (Suharto, 2017). Kemiskinan dijelaskan sebagai segala hal yang selalu berhubungan dengan ketimpangan, kekurangan, dan kerentanan karena orang yang tidak di anggap miskin bisa saja sewaktu-waktu menjadi miskin jika mengalami permasalahan

contohnya adalah krisis global (Haughton & Khandker, 2009). Maka dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah suatu kondisi yang kurang mengenaikan bagi seseorang karena merasa dalam ketimpangan, serba kekurangan dalam melaksanakan tugas dan peran, serta dapat menjadi kerentanan bagi setiap orang karena sebuah peristiwa atau faktor tertentu.

2. Jenis kemiskinan

Pada dasarnya kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Seseorang dapat dikategorikan ke dalam miskin mutlak (absolut) apabila tidak mampu memenuhi kebutuhan minimumnya sehingga tidak mampu bertahan hidup sesuai dengan kondisi yang layak. Sedangkan, kemiskinan relatif merupakan komparasi antara dua kelompok pendapatan masyarakat. Perbandingan tersebut antara kelompok dengan kategori miskin dengan kelompok yang tidak miskin yang mempunyai tingkat pendapatan yang relatif tinggi daripada garis kemiskinan sehingga termasuk dalam kelompok masyarakat yang relatif lebih maju (Kartasasmita, 2001).

3. Faktor penyebab kemiskinan

Secara konseptual kemiskinan diakibatkan oleh empat faktor yaitu faktor individual, faktor sosial, faktor kultural, dan faktor struktural (Suharto, 2017).

Berikut ini adalah penjelasan dari berbagai faktor penyebab kemiskinan:

- a. Faktor individual, kemiskinan disebabkan oleh perilaku, pilihan, atau kemampuan dari orang tersebut dalam menghadapi kemiskinannya. Contohnya adalah kemiskinan yang diakibatkan dari perilaku judi *online*.

- b. Faktor sosial, kemiskinan disebabkan oleh kondisi lingkungan sosial yang menjebak seseorang menjadi miskin. Misalnya seperti diskriminasi berdasarkan usia, gender, etnis, yang menyebabkan seseorang menjadi miskin dan memperburuk kondisi sosial dan ekonomi keluarga.
- c. Faktor kultural, kemiskinan disebabkan oleh kondisi atau kualitas budaya yang menyebabkan seseorang menjadi miskin. Masalah ini sering menunjuk pada konsep kemiskinan kultural yang menghubungkan kemiskinan dengan kebiasaan hidup dan mentalitas yang telah menjadi budaya turun temurun.
- d. Faktor struktural, kemiskinan diakibatkan oleh struktur atau sistem yang tidak adil, tidak peka, dan tidak *accessible* sehingga menyebabkan seseorang atau sekelompok dibiarkan dalam kemiskinan tanpa perhatian.

4. Dimensi kemiskinan

Kemiskinan terbagi dalam beberapa dimensi penyebab seperti globalisasi, pembangunan, sosial, dan konsekuensi. Berikut adalah penjelasan dari dimensi kemiskinan yang ada (Suharto, 2017):

- a. Kemiskinan yang terjadi karena globalisasi. Globalisasi menciptakan negara pemenang dan kalah. Pemenangnya biasanya adalah negara-negara maju. Sebaliknya, negara-negara berkembang seringkali tersingkir dari persaingan dan pasar bebas yang merupakan prasyarat bagi globalisasi.
- b. Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Kemiskinan merupakan suatu kerentanan yang dapat terjadi karena rendahnya pembangunan di perdesaan maupun perkotaan.

- c. Kemiskinan sosial. Kemiskinan yang terjadi pada perempuan, anak-anak dan etnis minoritas disebabkan oleh kondisi sosial yang kurang menguntungkan bagi mereka.
- d. Kemiskinan konsekuensi. Kemiskinan ini terjadi akibat faktor eksternal yang tidak bisa dikendalikan dan dihindari oleh diri individu seperti konflik, bencana alam, kebakaran, dan lain-lainnya.

5. Kategori kemiskinan

Terdapat tiga kategori kemiskinan yang menjadi pusat perhatian dalam pekerjaan sosial (Suharto, 2017). Tiga kategori tersebut yaitu kelompok yang paling miskin (*destitute*), kelompok miskin (*poor*), dan kelompok rentan (*vulnerable group*). Berikut adalah rincian penjelasannya:

- a. Kelompok yang paling miskin (*destitute*) atau yang sering didefinisikan sebagai fakir miskin. Kelompok ini secara absolut memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan. Kelompok ini umumnya tidak memiliki sumber pendapatan, serta akses terhadap berbagai pelayanan sosial.
- b. Kelompok miskin (*poor*). Kelompok ini memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan namun relatif memiliki akses terhadap pelayanan sosial.
- c. Kelompok rentan (*vulnerable group*). Kelompok ini dapat dikategorikan bebas dari kemiskinan karena memiliki kehidupan yang lebih baik daripada kelompok *destitute* maupun miskin, namun rentan menjadi miskin.

2.2.5 Tinjauan tentang Kesejahteraan Sosial

1. Definisi

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Selain itu, kesejahteraan sosial juga diartikan sebagai sistem yang terkoordinasi dari pelayanan dan lembaga sosial yang dibuat untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mendapatkan keberfungsian sosialnya (Suud, 2006). Kesejahteraan sosial sebagai kegiatan dapat didefinisikan sebagai berikut:

kegiatan-kegiatan yang terorganisasi bagi peningkatan kesejahteraan sosial melalui pelayanan dalam menolong orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan, dan hubungan-hubungan sosial (Durham dalam Suud, 2006, hal. 87).

Pelayanan-pelayanan yang dimaksud tersebut harus memberi perhatian terhadap individu-individu, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas, dan kesatuan-kesatuan penduduk yang lebih luas. Hal ini meliputi pelayanan pada perawatan, penyembuhan, dan pencegahan. Kegiatan ini mencerminkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang harus saling membantu, agar kehidupan ini berjalan selaras dan harmonis dalam menciptakan suasana yang sejahtera.

2. Tujuan kesejahteraan sosial

Tujuan dari kesejahteraan sosial (sebagai suatu sistem) adalah untuk mengembalikan keberfungsian setiap individu, kelompok, dan masyarakat dalam menjalani kehidupan serta mengurangi tekanan dan guncangan sehingga meningkatkan kondisi yang sejahtera. Tujuan utama dari sistem kesejahteraan

sosial tercermin dan terlihat dalam semua program kesejahteraan sosial yang dijelaskan sebagai berikut (Fahrudin, 2014):

- a. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera maka kesejahteraan sosial perlu mendorong kehidupan yang tercapai standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
- b. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, maka kesejahteraan sosial bertujuan untuk menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang baik.

3. Fungsi kesejahteraan sosial

Fungsi kesejahteraan sosial adalah untuk memperbaiki secara bertahap dalam kondisi kehidupan seseorang melalui pengembangan sumber daya manusia, penciptaan sumber lokal, serta penyediaan lembaga dalam berfungsinya pelayanan yang terorganisasi untuk perubahan-perubahan yang positif. Fungsi kesejahteraan sosial antara lain adalah sebagai berikut (Fahrudin, 2014):

a. Fungsi pencegahan (*preventive*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat agar terhindar dari masalah-masalah sosial yang baru.

b. Fungsi penyembuhan (*curative*)

Kesejahteraan Sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar dapat berfungsi kembali

secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi).

c. Fungsi pengembangan (*development*)

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung maupun tidak dalam proses pembangunan dan pengemban tatanan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

d. Fungsi penunjang (*supportive*)

Fungsi ini bertujuan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain. Fungsi kesejahteraan sosial ini dapat di terapkan dalam praktik pekerjaan sosial secara generalis maupun pemecahan masalah fakir miskin yang tidak dapat terlaksana peran dan tugas kehidupannya secara spesifik.

4. Komponen kesejahteraan sosial

Selain memiliki tujuan dan fungsi, kesejahteraan sosial juga memiliki beberapa komponen. Komponen tersebut menjadi suatu pembeda antara kesejahteraan sosial dengan kegiatan lainnya. Komponen-komponen dalam kesejahteraan sosial antara lain sebagai berikut (Fahrudin, 2014):

- a. Organisasi formal. Kesejahteraan sosial terorganisasi secara formal dan dilakukan oleh organisasi/badan sosial yang formal. Kegiatan yang dilaksanakan memperoleh pengakuan masyarakat karena memberikan pelayanan secara terarah dan teratur, serta pelayanan yang diberikan merupakan fungsi utamanya.

- b. Pendanaan. Tanggung jawab dalam kesejahteraan sosial bukan hanya tanggung jawab pemerintah melainkan juga tanggungjawab masyarakat. Mobilisasi dana dan sumber adalah tanggung jawab pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan. Kegiatan pendanaan ini tidak mengejar keuntungan semata.
- c. Tuntutan kebutuhan manusia. Kesejahteraan sosial harus memandang kebutuhan manusia secara keseluruhan serta tidak hanya memandang manusia dari satu aspek saja. Hal inilah yang membedakan pelayanan kesejahteraan sosial dengan yang lainnya. Pelayanan kesejahteraan sosial diadakan karena tuntutan kebutuhan manusia.
- d. Profesionalisme. Pelayanan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara professional berdasarkan kaidah ilmiah, tersrtuktur, sistematis, dan menggunakan metoda dan teknik-teknik pekerjaan sosial dalam praktiknya.
- e. Kebijakan. Pelayanan kesejahteraan sosial harus ditunjang oleh seperangkat perundang-undangan yang mengatur syarat memperoleh, proses pelayanan dan pengakhiran pelayanan.
- f. Peran serta masyarakat. Usaha kesejahteraan sosial harus melibatkan peran serta masyarakat agar dapat berhasil dan memberi manfaat kepada masyarakat.
- g. Data Informasi kesejahteraan sosial. Pelayanan kesejahteraan sosial harus ditunjang dengan data dan informasi yang tepat. Tanpa data dan informasi yang tepat maka pelayanan akan tidak efektif dan tidak tepat sasaran.

2.2.6 Tinjauan tentang Pekerjaan Sosial

1. Definisi

Pekerjaan sosial adalah sebagai cara lembaga sosial untuk membantu orang-orang mencegah (untuk mendapatkan masalah) dan memecahkan masalah-masalah sosial mereka dengan tujuan untuk memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial mereka (Fahrudin, 2014). Pekerjaan sosial adalah kegiatan profesional yang bertujuan untuk membantu seseorang, kelompok, maupun masyarakat untuk meningkatkan dan atau memperbaiki kemampuan keberfungsian sosial mereka serta mewujudkan kondisi masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mencapai tujuan yaitu kesejahteraan sosial (Zastrow, 2017). Berdasarkan berbagai definisi di atas, maka pekerjaan sosial dapat didefinisikan sebagai suatu profesi yang memiliki fokus utama untuk meningkatkan atau memperbaiki keberfungsian sosial seseorang, kelompok, atau masyarakat melalui pemecahan atau intervensi masalah secara profesional dengan nilai, pengetahuan, dan keterampilan.

2. Tujuan

Dalam menjalankan profesi pertolongan, pekerja sosial tidak lepas dari kondisi sosial klien yang bermasalah. Klien dapat berupa individu, kelompok, atau masyarakat yang tidak mampu melaksanakan adaptasi dengan lingkungan sekitar atau mengalami hambatan-bambatan sehingga tidak mampu membawakan peranan-peranan sosial sesuai yang diharapkan oleh masyarakat dimana mereka hidup di dalamnya. Pekerja sosial diharapkan mampu membantu dan memecahkan masalah para klien melalui pemberian pertolongannya karena

itu adalah tujuan utama dari profesi pekerjaan sosial. Berikut ini adalah tujuan praktik pekerjaan sosial (NASW dalam Fahrudin, 2014):

- a. Meningkatkan kemampuan orang untuk memecahkan masalah, mengatasi masalah (*coping*), dan memahami perkembangannya.
- b. Menghubungkan orang dengan sistem-sistem yang memberikan kepada mereka beragam sumber, pelayanan, dan kesempatan yang ada.
- c. Memperbaiki keefektifan secara manusiawi dari sistem-sistem yang menyediakan orang dengan sumber-sumber dan pelayanan-pelayanan.
- d. Mengembangkan dan memperbaiki kebijakan sosial.

3. Peran pekerja sosial

Pekerja sosial memiliki beberapa peran dalam melaksanakan praktik pertolongan pekerjaan sosial dan pemecahan masalah yang antara lain adalah sebagai berikut (Zastrow dalam Adi, 2013):

- a. Pekerja sosial sebagai tenaga ahli (*expert*)

Peran pekerja sosial sebagai ahli profesional adalah pekerja sosial yang ditugaskan untuk memberikan nasihat dan dukungan informasi di berbagai bidang. Nasihat dan dukungan pekerja sosial dapat menjadi kontribusi dan gagasan yang perlu diperhatikan oleh individu, kelompok, atau masyarakat.

- b. Pekerja sosial sebagai perantara (*broker*)

Peran pekerja sosial sebagai perantara adalah pekerja sosial yang bertugas di masyarakat berfungsi untuk menghubungkan kelompok dan individu dalam masyarakat yang membutuhkan dukungan dan pelayanan.

c. Pekerja sosial sebagai pembela (*advocate*)

Peran pekerja sosial sebagai pembela (*advocate*) adalah peranan yang menempatkan pekerja sosial sebagai orang yang siap membela kepentingan klien berkenaan dengan hukum atau administrasi lembaga pelayanan lain.

d. Pekerja sosial sebagai pendidik (*educator*)

Peran pekerja sosial sebagai pendidik tergantung pada tema yang ditugaskan, pekerja sosial diharapkan dapat berbicara di depan umum dan menyampaikan informasi edukatif terkait tema

e. Pekerja sosial sebagai pemercepat perubahan (*enabler*).

Pekerja sosial membantu individu, kelompok, dan komunitas mengakses sistem sumber daya yang ada, mengidentifikasi masalah, dan mengembangkan kapasitas untuk kebutuhan mereka.

4. Pekerjaan sosial di aras makro

Intervensi tingkat makro dalam pekerjaan sosial melibatkan lingkungan sekitar, komunitas, serta masyarakat untuk mewujudkan perubahan-perubahan sosial (DuBois & Miley, 2014). Praktik pekerjaan sosial skala makro memerlukan pengetahuan tentang norma dan nilai sosial serta keterampilan partisipasi masyarakat yang diperlukan untuk memulai pemecahan masalah.

5. Strategi dan taktik pekerjaan sosial di aras makro

Strategi adalah usaha-usaha menyeluruh yang dirancang untuk mencapai perubahan-perubahan yang usulkan agar dapat diterima, sedangkan taktik menunjuk teknik-teknik spesifik termasuk perilaku-perilaku tertentu yang akan diterapkan agar strategi dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Terdapat

beberapa jenis strategi dan taktik dalam pengembangan masyarakat antara lain sebagai berikut (Brager & Holloway, 2002):

- a. *Collaboration*. Digunakan untuk sistem sasaran yang setuju atau diyakinkan untuk setuju terhadap sistem kegiatan bahwa perubahan dibutuhkan dan didukung dengan pengalokasian sumber. Teknik dalam strategi kolaborasi adalah implementasi, *capacity building*, partisipasi, dan *empowerment*.
- b. *Campaign*. Digunakan untuk sistem sasaran yang mau berkomunikasi dengan sistem kegiatan, tetapi hanya sedikit kesepakatan terhadap perlunya perubahan. Atau sistem sasaran mendukung perubahan, tetapi tidak mengalokasikan sumber. Teknik yang dapat digunakan adalah pendidikan, persuasi, bergabung, melobi, serta meminta bantuan media massa.
- c. *Contest*. Digunakan untuk sistem sasaran menentang perubahan dan atau menentang pengalokasian sumber dengan tidak memberikan alasan pasti mengapa penentangan dilakukan. Strategi yang bisa digunakan adalah tawar menawar, aksi komunitas legal, serta aksi penuntutan perkara.

6. Tahapan pekerjaan sosial di aras makro

Pekerjaan sosial komunitas merupakan suatu bentuk praktik yang dikemas dalam bentuk intervensi profesional yang bertujuan untuk mewujudkan perubahan terencana dalam organisasi dan masyarakat (Netting, dkk., 1993).

Tahapan-tahapan praktik pekerjaan sosial berbasis komunitas dilaksanakan melalui berbagai tahapan dimulai dari inisiasi sosial, pengorganisasian sosial, asesmen sosial, penyusunan rencana intervensi, pelaksanaan intervensi, evaluasi, hingga terminasi dan rujukan sosial.

7. Model intervensi pekerjaan sosial komunitas di aras makro

Untuk dapat melaksanakan proses intervensi yang optimal, dibutuhkan pemahaman mengenai model intervensi pekerjaan sosial aras makro. Terdapat tiga model dalam pelaksanaan intervensi komunitas yaitu *locality development*, *social planning*, dan *social action* (Jack Rothman, dalam Adi, 2019). Berikut adalah penjelasan dari ketiga model tersebut:

- a. *Community development*, Model ini mengakui bahwa perubahan atau pembangunan masyarakat paling baik dan tepat dicapai melalui partisipasi aktif dari masyarakat lokal.
- b. *Social planning*, model terutama menekankan pada proses penyelesaian perencanaan masalah teknis. Model ini meyakini bahwa permasalahan yang dihadapi masyarakat bersifat kompleks dan perlu direncanakan.
- c. *Social action*, dalam model ini, kelompok-kelompok yang posisinya lebih lemah dibandingkan kelompok lain sering kali tertindas dalam masyarakat. Untuk itu perlu dibantu, diorganisir, dan digerakkan agar menekan struktur kekuasaan yang menindas mereka.

2.2.7 Tinjauan tentang Sistem Sumber

1. Pengertian

Sistem sumber diartikan sebagai segala sesuatu yang memiliki nilai, yang tersimpan atau langsung tersedia, di mana seseorang, kelompok, atau masyarakat dapat mencari, menggali, dan menggunakannya sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya atau memecahkan masalah tertentu (Sukoco, 2021).

2. Jenis sistem sumber

Allen Pincus dan Anne Minahan membagi sistem sumber menjadi tiga bagian yaitu informal (alamiah), formal, dan kemasyarakatan (Sukoco, 2021). Berikut adalah penjelasan rinci mengenai ketiga sistem sumber:

a. Sistem sumber informal

Sistem sumber informal atau alamiah adalah sumber-sumber yang dapat digunakan untuk mendapatkan bantuan berupa dukungan emosional, afeksi, konseling, dan beragam informasi yang bisa digunakan untuk memecahkan permasalahan tertentu. Sistem sumber ini dapat diakses secara mudah, tidak menggunakan prosedur, bersifat tanpa imbalan, ikhlas, jujur, penuh persahabatan, dan cinta kasih. Contoh sumber informal dapat berupa teman, keluarga, tetangga, rekan kerja, pasangan, dan lain-lain.

b. Sistem sumber formal

Sistem sumber formal merupakan sumber-sumber yang dapat digunakan untuk memperoleh bantuan atau pelayanan hanya kepada para anggotanya. Meskipun hanya dapat digunakan oleh para anggotanya, sistem sumber ini juga dapat memberikan dampak kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, sistem sumber formal dapat membantu anggotanya untuk menggunakan manfaat dari sistem sumber kemasyarakatan. Sumber-sumber formal biasanya berbentuk lembaga formal, seperti organisasi, serikat buruh, dan lain-lain. Contoh dari sumber formal adalah Independen Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI).

c. Sistem sumber kemasyarakatan

Jenis sistem sumber yang terakhir adalah sistem sumber kemasyarakatan. Sistem sumber ini dapat memberi manfaat berupa bantuan atau jasa langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Sumber-sumber ini biasanya diciptakan dan diselenggarakan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan baik dari pemerintah berwenang maupun pihak swasta. Sistem sumber kemasyarakatan juga dapat dijangkau dengan baik dan terbuka oleh masyarakat pada umumnya melalui prosedur yang mudah. Contoh dari sistem sumber kemasyarakatan adalah dinas sosial, organisasi PKK, Peduli Anak Foundation, dan lain-lain.

2.2.8 Tinjauan tentang Kohesivitas Kelompok

1. Pengertian

Kohesivitas kelompok merupakan suatu keadaan di mana kelompok memiliki ketertarikan interpersonal, solidaritas tinggi, terjalinnya hubungan yang tulus, dan memiliki komitmen bersama untuk mencapai tujuan sehingga setiap anggota kelompoknya menjadi kuat dari kerentanan (Rahmat, 2008).

2. Faktor yang Memengaruhi

Terdapat beragam faktor yang memengaruhi kondisi kohesivitas kelompok (Sugiyarta, 2009). Berikut adalah rincian faktor-faktor yang memengaruhinya:

- a. Potensi kelompok yang memberi pengaruh terhadap individu;
- b. Motif yang mendasari keanggotaan dalam kelompok;
- c. Kesamaan dan harapan terhadap kelompok.